

 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN	NOMOR SOP	440 / 3038
	TANGGAL PEMBUATAN	02 Januari 2021
	TANGGAL REVISI	02 Januari 2022
	TANGGAL EFEKTIF	02 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	 dr. Jusi Febrianto, MPH NIP. 197002192002121004
	NAMA SOP	PERMOHONAN PENYULUHAN PKRT
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
a. UU Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 112 b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; d. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Berita Negara RI tahun 2014 Nomor 1563. h. Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;	a. Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik; b. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan c. Memahami Perizinan PKRT d. Memahami peraturan per-Undang-Undangan mengenai produksi PKRT	

i. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 399; k.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
a. SOP Permohonan PKRT b. SOP Monitoring PKRT	a. Cek list kelengkapan dokumen b. Alat Tulis Kantor c. Komputer d. Printer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perizinan masyarakat terhambat	Disimpan sebagai data dan manual

DIAGRAM ALIR SERTIFIKAT PERSYARATAN

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENYULUHAN PERUSAHAAN RUMAH TANGGA ALKES DAN/ATAU PKRT

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Ka. Bid. Yankes & SDK	Ka. Sie. Kefarmasian dan Alkes	Tim Teknis	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan Penyuluhan PKRT ke Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga						Persyaratan permohonan surat keterangan penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan/atau PKRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	30 menit	Surat dan berkas masuk ke Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga	
2.	Memverifikasi persyaratan permohonan surat keterangan penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan/atau PKRT						Persyaratan permohonan surat keterangan penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan/atau PKRT	30 menit	Verifikasi	
3.	Persyaratan tidak lengkap dikembalikan untuk diperbaiki						Persyaratan permohonan surat keterangan penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan/atau PKRT	30 menit	Verifikasi	
4.	Persyaratan lengkap dilakukan Penerbitan permohonan surat keterangan penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan/atau PKRT						Berkas Perizinan	1 hari	Pembuatan Surat Permohonan Keterangan Penyuluhan PKRT	
5.	Membuat Surat Permohonan Keterangan Penyuluhan PKRT ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah						Berkas Perizinan	1 hari	Berita Acara Pemeriksaan Apotek	